

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MANTAN DIREKTUR PERUSAHAAN
YANG TIDAK MEMPEROLEH PEMBAYARAN UPAH DAN
TAGIHANNYA DITOLAK DALAM PENCOCOKAN TAGIHAN**

Nama: Salsabila Alfitria

Jurusan/Program Studi: Hukum

Pembimbing: Dr. Sylvia Janisriwati S.H., M.Hum., Heru Saputra Lumban Gaol,
S.H., M.H.

ABSTRAK

Tugas akhir yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Mantan Direktur Perusahaan yang Upahnya Tidak Dibayarkan dan Tagihannya Ditolak Dalam Pencocokan Tagihan ini membahas permasalahan apakah perlindungan hukum bagi mantan direktur yang upahnya tidak dibayarkan dan tagihannya ditolak dalam pencocokan tagihan. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah *conceptual approach* yang menyelesaikan permasalahan melalui literatur dan pandangan para sarjana hukum dan *statue approach* yang menyelesaikan permasalahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil Penelitian menyatakan bahwa penolakan terhadap pengajuan tagihan yang diajukan oleh mantan direktur atas upah yang tidak dibayarkan termasuk dalam utang karena tidak akan hapus suatu perhutangan jika tidak dilakukan suatu pemenuhan dari perhutangan tersebut dengan cara dibayarkan upah yang terutang kepada mantan direktur sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian Perlindungan hukum bagi mantan direktur yang upahnya tidak dibayarkan dan tagihannya ditolak dapat diperoleh melalui 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang diakomodasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Kemudian perlindungan hukum represif dapat dilakukan dalam bentuk upaya gugatan lain-lain berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu salah satunya mengajukan gugatan terhadap pengurus yang berkaitan dengan harta kekayaan debitor.

Kata kunci: *PKPU, Perikatan, Wanprestasi, Upah*

LEGAL PROTECTION FOR FORMER DIRECTORS WHOSE WAGES ARE NOT PAID AND WHOSE BILLS ARE REJECTED IN BILL MATCHING

Name: Salsabila Alfitria

Dicipline/Study Programme: Law

Contributor: Dr. Sylvia Janisriwati S.H., M.Hum., Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.

ABSTRACT

The final project entitled Legal protection for former directors whose wages are not paid and whose bills are rejected in bill matching discusses the issue of whether legal protection is for ex-directors whose wages are not paid and whose bills are rejected in matching bills. Writing this thesis aims to fulfill one of the requirements to obtain a Bachelor of Laws degree at the Faculty of Law, University of Surabaya. The research method uses conceptual approach which means solves problems using literature and views of legal scholars and also using statue approach which means solves problems using applicable laws and regulations. The results of the study stated that the refusal to submit a bill submitted by the former director for unpaid wages is a debt because it will not erase a debt if there is no fulfillment of the debt by paying the owed wages to the former director according to what was agreed. Then Legal protection for former directors whose wages are not paid and whose bills are rejected in bill matching can be obtained through 2 (two) forms, namely preventive legal protection accommodated by the Civil Code, the Bankruptcy Law and Suspension of Debt Payment Obligations, the Labor Law and Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. Then repressive legal protection can be carried out in the form of other lawsuits based on the explanation of Article 3 paragraph (1) Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, which is filing a lawsuit against the board relating to the debtor's assets.

Keywords: *Suspension of Dept Payment Obligations, law of obligations, Event of Default, wages*